

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas institusi pemerintahan mengacu pada evaluasi kognitif sejauh mana lembaga negara memiliki sifat pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang berkualitas (*good governance*) dalam teori mempunyai artian sebagai pelaksanaan tata kelola kekuasaan yang dilandaskan pada seperangkat regulasi hukum yang berlaku, penentuan kebijakan secara transparan, serta pertanggungjawaban yang adil kepada masyarakat (Kaloh, 2010:172). Definisi kualitas institusi pemerintahan sangat beragam. Kaufmann et al., (2011) mendefinisikan bahwa pemerintahan sebagai suatu bentuk dari kebiasaan dan institusi di mana otoritas dalam sebuah negara menjalankan kewenangannya.

Kualitas pemerintah didefinisikan sebagai tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negara dijalankan, yaitu: (1) proses pemerintah dipilih, diamati, dan diganti; (2) kemampuan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan secara efektif; (3) rasa hormat rakyat dan pemerintah terhadap institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial (Kaufmann et al., 2011). Kualitas pemerintah juga diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam membentuk dan menerapkan kebijakan secara efektif. Kualitas pemerintah diartikan secara luas sebagai institusi yang memiliki otoritas menjalankan suatu negara (Kaufmann et al., 2011).

Konsep kualitas institusi pemerintahan dan prinsip-prinsipnya pertama kali diusulkan oleh *World Bank*, *United Nations Development Program (UNDP)* dan *Asian Development Bank (ADB)*, dan selanjutnya berdasarkan prinsip dasar tersebut dikembangkan oleh berbagai ahli dari negara berkembang guna menciptakan ide yang tepat menyangkut tata kelola pemerintahan Kaufmann et al., (1999) Istilah kualitas institusi pemerintahan pada dasarnya memiliki dua pemahaman. Pemahaman yang pertama yaitu nilai yang memeluk erat aspirasi dan kebutuhan rakyat, dan nilai-nilai yang bisa mengasah kapabilitas masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional ketahanan, kemandirian, pembangunan

berkelanjutan, dan keadilan secara sosial. Pemahaman yang kedua yaitu aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien ketika menjalankan fungsinya dalam usahanya mencapai tujuan itu (Samarasinghe, 2018). Kualitas institusi pemerintahan dapat dikatakan efektif apabila telah menerapkan kebijakan yang baik untuk keseimbangan ekonomi dan sosial bagi warga negaranya.

Kualitas pemerintah dapat diukur dengan enam indikator *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang merupakan kumpulan indikator di bidang pemerintahan yang diterbitkan oleh *World Bank*, melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group* sejak tahun 1996 yang mencakup lebih dari 215 negara dan wilayah selama periode 1996-2019 (Kaufmann et al., 2011). Keenam indikator tersebut di antaranya (1) *Voice and Accountability* merupakan indikator yang mencerminkan kegiatan demokrasi di suatu negara yang diukur dari tingkat keikutsertaan warga negara dalam pemilihan pemimpin pemerintahan negara tersebut, tingkat kebebasan dalam menyuarakan pendapat atau aspirasi mereka, kebebasan untuk berkumpul atau berserikat, dan kebebasan untuk menentukan kebijakan publik; (2) *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* adalah indikator yang mengestimasi pandangan mengenai ketidakstabilan politik; (3) *Government Effectiveness* yaitu indikator yang menjadi ukuran tentang seberapa baik kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil, kemandirian pemerintah dari permasalahan politik, kualitas perumusan dan tindakan untuk menjalankan kebijakan, serta komitmen pemerintah terhadap kebijakan; (4) *Regulatory Quality* adalah indikator yang mengukur kapabilitas pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan (regulasi) dan mendorong pengembangan sektor swasta; (5) *Rule of Law* merupakan indikator yang menjadi ukuran sejauh mana seseorang mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya terkait kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan, dan hukum, dan yang terakhir indikator; (6) *Control of Corruption* yang dapat dikatakan sebagai indikator yang mengukur sejauh mana adanya tindakan menyelewengkan otoritas untuk kepentingan pribadi seperti melakukan tindakan korupsi.

Di wilayah Asia, Kraipornsak (2018) menjelaskan mengenai kualitas institusi yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi bagi 16 negara di Asia

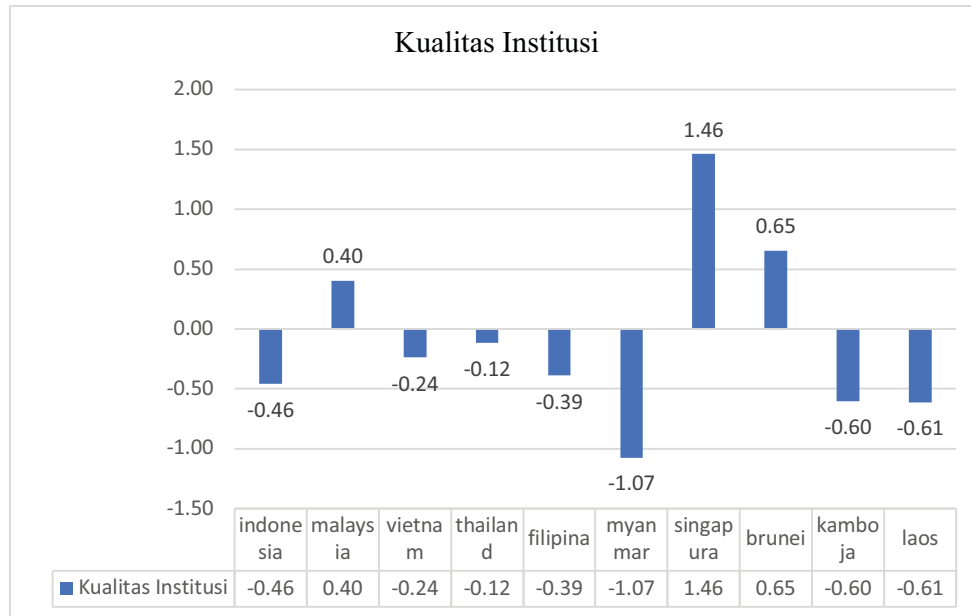
selama periode 1996-2016. Keenam indikator WGI memiliki persentase yang tinggi di negara maju Asia. Keenam indikator WGI di negara berkembang Asia khususnya Thailand memiliki persentase yang rendah. Thailand merupakan negara berpenghasilan menengah ke atas dengan nilai pendapatan per kapita sebesar 2,57 persen per tahun selama 2011-2016. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita tersebut, sulit bagi Thailand dan negara berkembang Asia lainnya menjadi negara berpenghasilan tinggi tanpa adanya perbaikan kualitas pemerintah.

Di wilayah ASEAN merupakan salah satu kawasan yang menerapkan institusi pemerintahan. Krisis ekonomi yang berlangsung secara merusak negara-negara ASEAN pada tahun 1997-1998 adalah konsekuensi buruk dari ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk sebuah negara. Berdasarkan hasil riset *Asian Development Bank (ADB)* terhadap 5 negara di Asia, tidak diimplementasikannya suatu sistem institusi pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menyebabkan akibat yang fatal pada ekonomi sebuah negara bahkan juga bisa berimbas juga pada negara-negara tetangga maupun yang mempunyai relasi dengan negara tersebut. Isi laporan tersebut menunjukkan bahwa *governance* yang lemah adalah satu dari beberapa penyebab berlangsungnya krisis ekonomi di ASEAN pada rentang waktu krisis 1997-1998 (Huang & Ho, 2017).

Pada tabel dibawah ini menjelaskan mengenai rata-rata indeks kualitas institusi di ASEAN pada tahun 2001-2019. Pada Gambar 1.1 menggambarkan mengenai tingkat indeks kualitas institusi pemerintahan di 10 negara ASEAN. Negara Singapura punya indeks kualitas institusi pemerintahan yang cukup baik karena memiliki nilai 1.52. Nilai tersebut hampir mendekati 2.5, menurut Bank Dunia, angka -2.5 menyimbolkan bahwa pencapaian dari setiap indikator kualitas institusi pemerintahan di negara itu tergolong terburuk dan angka 2.5 menggambarkan bahwa prestasi dari kualitas institusi pemerintahan di negara tersebut dinilai terbaik (Bank Dunia, 2021).

Faktor yang mendorong tata kelola yang baik di negara Singapura yaitu regulasi terkait kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu dilandaskan atas konstitusi atau perundangan; dan salah satu prinsip penting dari

pengaturan kekuasaan adalah menjunjung prinsip kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitatif, serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tersebut tidak ada toleransi, (Grabowski & Self, 2020).



Gambar 1.1
Rata-Rata Indeks Kualitas Institusi Pemerintahan di ASEAN Tahun 2001-2019
Sumber: World Bank (2021)

Rata-rata indeks kualitas institusi pemerintahan yang memiliki nilai positif yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan negara Filipina, Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos memiliki nilai negatif. Rata-rata indeks kualitas institusi pemerintahan negara Myanmar memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lain. Hal ini diharapkan masing-masing pemerintah di setiap negara terus berupaya untuk mendorong terciptanya institusi pemerintahan dengan prestasi yang baik (Bank Dunia, 2021).

Kualitas institusi pemerintahan yang baik telah didorong oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa institusi pemerintahan telah memegang kunci untuk memahami pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Rothstein & Teorell, 2008). Keterkaitan antara kualitas institusi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi subjek aktualitas bahkan telah menjadi subjek beberapa

studi selama beberapa dekade. Sejak tahun 1990, organisasi internasional seperti *World Bank* dan PBB telah menekankan pentingnya kualitas institusi pemerintahan di suatu negara untuk menuai manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial (Hadj Fraj et al., 2018).

Karakteristik kualitas institusi pemerintahan dapat berpengaruh penting bagi pertumbuhan ekonomi (Rodrik et al., 2004). Terdapat dua cara bagaimana kualitas institusi pemerintahan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, institusi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan produktivitas modal manusia dan investasi. Proses tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengikuti model Solow. Kedua, di bidang infrastruktur, institusi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan lembaga-lembaga utama negara dan menciptakan kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi negaranya, sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (Samarasinghe, 2018).

Semakin banyak literatur menunjukkan bahwa kualitas institusi pemerintahan telah membantu teori modern dalam menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi. Jelas bahwa institusi berperan penting dalam membentuk kinerja ekonomi nasional. Kumpulan literatur yang ada menunjukkan munculnya konsensus di antara para ekonom, peneliti, dan pembuat kebijakan bahwa tata kelola yang buruk dan lembaga yang lemah dapat memiliki efek regresif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, (Gani, 2011). Menurut Globerman & Shapiro (2002), meningkatkan kualitas pemerintahan semakin penting secara global dan khususnya bagi negara-negara berkembang yang mengambil langkah-langkah besar untuk mereformasi perekonomian di suatu negara dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di setiap negara.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan mengenai perbandingan antara pengaruh kualitas pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk negara maju dan negara berkembang (Gani, 2011; AlShiab et al., 2020; Hadj Fraj et al., 2018). AlShiab et al., (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 29 negara maju dan berkembang selama periode 1997-2014. Kualitas pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang. Menurut Gani (2011), di 84 negara berkembang hanya dua indikator

yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua indikator tersebut yaitu stabilitas politik dan efektivitas pemerintah. Peningkatan kualitas pemerintah di negara berkembang sangat penting dalam hal menarik investasi domestik dan asing, bantuan luar negeri, stabilitas keuangan serta meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang secara keseluruhan. Negara berkembang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki kualitas pemerintah, khususnya dengan meningkatkan kebebasan berpendapat dan transparansi, mengendalikan tingkat korupsi, memperbaiki penegakan hukum pemerintah, serta memperbaiki kualitas regulasi. Penelitian dari Hadj Fraj et al., (2018) menunjukkan bahwa semua indikator kualitas pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang. Peneliti menggunakan sampel di 50 negara, yaitu 21 negara maju dan 29 negara berkembang selama periode 1996-2012. Kualitas pemerintah yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara maju. Di negara berkembang, kualitas pemerintah yang baik sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Fayissa & Nsiah (2013) menguraikan bahwa negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi punya ciri institusional yang baik, yang dapat diukur dengan enam variabel, yaitu *Control of Corruption, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Voice and Accountability, Rule of Law, and Regulatory Quality*. Jika keenam indikator tersebut terwujud maka pertumbuhan ekonomi akan relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas institusi yang baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hasil yang sama ditemukan dalam studi oleh Nawaz (2015), bahwa kualitas institusi pemerintahan memang penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi terutama pada jangka panjang, dan analisis empiris menegaskan hubungan yang searah antara institusi dan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Ogbuabor et al., (2020), yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik yang signifikan antara kualitas institusi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Afrika Barat. Permasalahan yang dihadapi yaitu tingginya kasus korupsi, ketidakefektifan pemerintah, kualitas

regulasi yang lemah, politik yang tidak stabil, kurangnya penegakan hukum dan tidak adanya kebebasan berpendapat dan transparansi yang ditemukan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Afrika Barat.

Selain faktor kualitas institusi pemerintah, terdapat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satunya melalui *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu penanaman modal yang dijalankan oleh perusahaan multinasional (*multinational company*/MNC) dari suatu negara ke negara penerima investasi (Todaro & Smith, 2012). FDI adalah satu dari beberapa bagian dari rangkaian peristiwa globalisasi ekonomi yang erat kaitannya dengan kerja sama ekonomi antara negara-negara mitra dagang karena arus investasi masuk dari suatu negara ke negara lain.

Masing-masing negara berupaya untuk memperbesar daya saing ekonomi dan daya tarik investasi untuk menggait para investor dari perusahaan multinasional agar mau menjalankan investasi di negaranya karena FDI dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu negara melalui proses penyaluran aset, keahlian manajemen, dan teknologi baik dalam bentuk benda maupun pengetahuan teknis (Anwar et al., 2016). Negara berkembang membutuhkan FDI untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dalam negara tersebut. Selain itu, pembiayaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada negara berkembang cenderung besar dan sebagian besar mampu diakibatkan oleh tingkat spekulasi investor terhadap situasi rentan, stabilitas politik, dan konflik pada negara yang dituju.

Beberapa penelitian empiris menemukan pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Campos & Kinoshita, 2002; Herzer, 2012). Penelitian dari Campos & Kinoshita (2002) menunjukkan pengaruh positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Herzer (2012) menunjukkan pengaruh negatif dari FDI terhadap pertumbuhan ekonomi.

Campos & Kinoshita (2002) menemukan bahwa beberapa literatur empiris tidak dapat menetapkan dampak positif dan signifikan dari FDI pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesulitan yang dialami Campos & Kinoshita (2002) adalah adanya teori yang menyamakan FDI dengan transfer teknologi, di

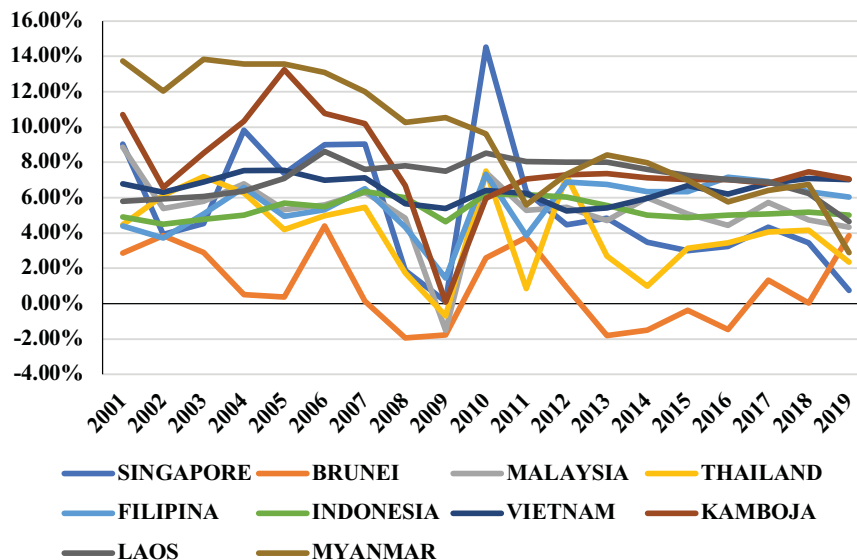
sebagian besar negara di dunia, FDI mencakup serangkaian pengaturan yang melampaui transfer teknologi murni. Campos & Kinoshita (2002) menemukan bahwa FDI memiliki korelasi positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Herzer (2012) menjelaskan di negara berkembang FDI berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Menurut Herzer (2012), kualitas pemerintah yang baik dapat melindungi negara dari pengaruh negatif FDI dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.

Selain kualitas institusi dan FDI, Barro (2003) menyatakan bahwa *Trade Openness* di suatu negara memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana aktivitas perdagangan internasional akan menghasilkan pengaruh yang selaras dan signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan berlangsungnya proses globalisasi, perdagangan bergerak ke arah yang ekonomi yang lebih terbuka. Negara yang terbuka secara ekonomi bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu globalisasi mengharuskan semua negara untuk membuka perekonomian dengan diadakannya perdagangan internasional yang idealnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan berlangsungnya proses globalisasi, satu negara memiliki ikatan saling ketergantungan secara ekonomi dengan negara lain sehingga ketika kondisi ekonomi, politik, maupun sosial di salah satu mitra dagang memburuk, maka tidak bisa dielakkan bahwa akan timbul dampak serupa pada negara mitra dagang lain. Globalisasi berdasar uraian Barker (2004) adalah keterikatan global dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang bersifat ekspansif ke seluruh penjuru dunia dan menciptakan hubungan sistematis antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan memengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya pada 1998 yang merupakan tahun terjadinya sejarah mengerikan bagi ekonomi di negara-negara di Asia dengan munculnya krisis moneter atau krisis ekonomi yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan kemakmuran masyarakat Asia. Oleh karena itu terbukanya perekonomian bisa memberikan dampak sistematis terhadap negara lain.

Penelitian dari Tahir & Khan (2014) menunjukkan bahwa *trade openness* berkontribusi signifikan terhadap proses pertumbuhan di negara berkembang Asia. Selain keterbukaan ekonomi, faktor investasi dalam negeri dan modal manusia telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara di kawasan Asia. Dengan mempercepat proses liberalisasi perdagangan, serta memperhatikan faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang lain, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Kualitas institusi pemerintahan, FDI, dan *Trade Openness* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Grafik di bawah ini merupakan gambaran atas perkembangan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN:



Gambar 1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Tahun 2001-2019 (dalam persen)
Sumber: World Bank

Gambar 1.2 menggambarkan fluktuasi perkembangan pertumbuhan ekonomi di 10 negara ASEAN pada periode 2001-2019. Pada tahun 2007-2009 negara-negara di ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang turun dengan sangat signifikan karena lanjutan dari Krisis Ekonomi Global 2008. Krisis ekonomi global tahun 2008 berawal dari Amerika Serikat akibat *subprime mortgage* yaitu kredit macet perbankan terhadap sektor perumahan di Amerika Serikat. Saling ketergantungan dalam aspek ekonomi antar negara turut berkontribusi dalam

timbulnya krisis global di Asia pada 2008 karena harus mempertaruhkan cadangan devisa negara. Krisis global yang terjadi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN (ADB, 2009).

Pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi dari periode 2001-2019 yang tertinggi adalah negara Myanmar. Hal tersebut dikarenakan negara Myanmar mengambil langkah cepat dan taktis dalam reformasi ekonomi dengan memperbaiki infrastruktur keuangan untuk menyambut masuknya investasi asing dan perdagangan internasional, (ADB, 2015). Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terendah dari tahun 2001-2019 yaitu negara Brunei Darussalam yang berada di antara *range* -2% - 4%. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan ekonomi Brunei Darussalam sangat dipengaruhi oleh ekspor migas yang selalu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara Brunei Darussalam. Fluktuasi harga minyak dunia dan produksi gas ketika mengalami penurunan yang bertahap akan menimbulkan kerentanan yang nyata dalam prospek ekonomi negara Brunei Darussalam pada jangka panjang karena ketergantungannya yang tinggi terhadap minyak dan gas.

Berdasarkan studi terdahulu yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah yang baik, FDI, dan *Trade Openness* akan mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN, di mana institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta mewujudkan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berkontribusi aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul “Pengaruh Kualitas Institusi, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN”.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Studi ini memakai data runtut waktu (*time series*) dan data *cross section* dengan beberapa variabel untuk mengukur pengaruh kualitas institusi pemerintahan, FDI, dan *Trade Openness* terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Sampel yang dipakai pada riset ini yaitu 10 Negara ASEAN selama

periode 2001-2019. Penelitian ini memperbarui penelitian dari Samarasinghe (2018) yang menggunakan periode waktu mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2014 dengan perbedaan pada penelitian ini memakai metode regresi GMM (*Generalized Moment Method*).

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa negara pada ASEAN memiliki kualitas pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Beragamnya kebudayaan masyarakat dan luasnya bentangan geografis yang ada pada setiap negara selalu menjadi alasan perlu diadakannya penelitian yang membahas mengenai dampak kualitas pemerintahan, FDI, dan *Trade Openness* terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan beberapa hasil studi yang telah menguraikan pengaruh kualitas institusi, FDI, dan *Trade Openness* terhadap pertumbuhan ekonomi, didapatkan hasil yang mendukung ataupun bertolak belakang dengan adanya keterkaitan antara ketiga variabel tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan dari beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan yang baik bukan hanya satu-satunya sebab yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal inilah yang memotivasi dan menjadikan Penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Selain kualitas institusi pemerintahan, FDI dan *Trade Openness* juga turut membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas institusi, FDI, dan *Trade Openness* dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Kualitas institusi pemerintahan pada studi ini menggunakan 6 indikator yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, and *Control of Corruption*. Studi ini menggunakan sampel 10 Negara ASEAN selama periode 2001 – 2019.

1.4. Sistematika Penelitian

Susunan penulisan yang membentuk struktur penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang saling berhubungan satu sama lain. Kelima bab tersebut terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Tinjauan Pustaka; (3) Metode Penelitian; (4) Hasil dan Pembahasan; (5) Simpulan dan Saran.